

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2022-2026



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN**

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perikanan Kabupaten Seluma.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan bidang perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seluma merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2022–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dalam periode Tahun 2022–2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2006 – 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perikanan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
2. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
3. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan di masa mendatang;
4. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma.

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

#### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

---

## **BAB. II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

#### **Tugas**

Dinas Perikanan Kabupaten Seluma mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perikanan dan Kelautan yang meliputi antara lain perikanan budidaya, perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

1. Membantu kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui sekretaris daerah;
2. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan perikanan;
4. Merumuskan sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
6. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perikanan;
8. Merumuskan kegiatan sekretariat dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Merumuskan sasaran penyusunan Renstra dinas, penyusunan Renja tahunan dinas perikanan ;

10. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kerja dan lakip dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
11. Mengkoordinasikan penyusunan laporan statistik perikanan dan laporan tahunan dinas;
12. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan (LKPJ) Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
13. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan (LKPD) setiap akhir tahun ke SKPD terkait;
14. Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang perikanan;
15. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang perikanan ;
16. Menyusun kebijakan pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
17. Menilai prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing bidang pada Dinas Perikanan, yaitu :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Maka sekretariat mempunyai fungsi:

1. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan administrasi teknis perikanan;
2. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
3. Menyusun rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
4. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam urusan bidang tugasnya ;
6. Mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersifat urgen kepada kepala dinas;
7. Mengkoordinasikan sasaran penyusunan renstra dinas, dan penyusunan renja tahunan serta kegiatan operasional dinas;
8. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kerja dan LAKIP dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;
9. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
10. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ bupati, LPPD dan profil dinas setiap akhir tahun ke kepala dinas;
11. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke kepala dinas;
12. Mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke SKPD terkait;
13. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan dinas;
14. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dilingkungan dinas;
15. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang perikanan
16. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meng-inventarisasi penghapusan barang;
17. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat dinas;
18. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala dinas;
19. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan statistik perikanan dan laporan tahunan dinas ;

20. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
21. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## **2. Bidang Perikanan Budidaya**

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan produksi perikanan, usaha budidaya perikanan, penyediaan serta pengembangan prasarana dan sarana perikanan. Serta mempunyai Fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
2. Membina, mengatur, membagi tugas, mengarahkan, mengawasi dan meneliti hasil kerja bawahan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya;
4. Menyusun strategi pencapaian sasaran program dan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya;
5. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya;
6. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA, dan penyusunan RENJA Bidang Perikanan Budidaya;
7. Mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan perjanjian kinerja dan LAKIP Bidang Perikanan Budidaya;
8. Mengkonsultasikan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang bersifat penting dan mendesak kepada Kepala Dinas;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya kepada atasan dan pihak-pihak terkait;
10. Melaksanakan usaha peningkatan dan pengembangan pembudidayaan ikan;

11. Melaksanakan standar dan peningkatan mutu produk pembenihan perikanan di air tawar dan air payau;
12. Melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan balai benih ikan;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
15. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat;
16. Menyiapkan, menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
17. Mengkoordinasikan dan menyiapkan rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan ikan;
18. Menyiapkan perlindungan dan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokal;
19. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penguatan lembaga kelompok pembudidaya ikan;
20. Melaksanakan pemberian bimbingan, pemantauan, pengembangan, pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
21. Menyiapkan pedoman teknis, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kabupaten;
22. Menyiapkan laporan statistik dan laporan tahunan perikanan budidaya;
23. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
24. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
25. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Budidaya Perikanan

### **3. Bidang Perikanan Tangkap**

Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis dan administrasi untuk pelayanan dan pembinaan usaha nelayan, prasarana dan sarana nelayan. Serta mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan tangkap;
3. Menyiapkan penyusunan Renstra, dan Renja, RKA, serta DPA Bidang Perikanan Tangkap berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Melaksanakan pencapaian sasaran program dan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap;
5. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian sasaran program dan kegiatan dibidang perikanan tangkap;
6. Menyiapkan penyusunan perjanjian kinerja dan LAKIP Bidang Perikanan Tangkap;
7. Mengkonsultasikan kegiatan bidang perikanan tangkap yang bersifat urgen kepada atasan;
8. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap;
9. Melaksanakan pengawasan, pengaturan dan peningkatan pemanfaatan wilayah laut dan perairan umum bagi perikanan tangkap;
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan dan perumusan estimasi stok ikan di wilayah perairan;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian rekomendasi izin penangkapan, pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 gt;
12. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha nelayan, sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap;
13. Melaksanakan dan memfasilitasi pembuatan, penyebarluasan peta pola dan sistem dan penyebaran ikan di wilayah laut dan perairan;

14. Melaksanakan upaya peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap serta pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil.
15. Menyiapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI);
16. Mengkooordinasikan dan menyiapkan bahan kebijakan serta pedoman teknis pembangunan kapal, pemeriksaan fisik kapal, pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 gt dan pembuatan alat penangkap ikan;
17. Melaksanakan upaya peningkatan produktivitas kapal penangkap ikan dengan penyediaan dan pengembangan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jarak jauh untuk penangkapan ikan;
18. Melaksanakan dan menyiapkan pedoman teknis standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan, pemanfaatan, penempatan rumpon di perairan laut dan perairan umum;
19. Mengkooordinasikan dan menyiapkan serta melaksanakan kerja sama dalam upaya dukungan rekayasa teknologi informasi dan aplikasi teknologi penangkapan ikan;
20. Menyiapkan penyusunan laporan statistik perikanan tangkap dan laporan tahunan;
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perikanan tangkap;
22. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
23. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
24. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Nelayan
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Nelayan

#### **4. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan serta akses pasar dan promosi produk perikanan. Serta mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundangan tentang penguatan daya saing produk perikanan;
3. Menyusun Renstra, Renja, RKA, dan DPA Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Menyiapkan penyusunan perjanjian kinerja dan LAKIP Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
6. Melaksanakan kegiatan penguatan daya saing produk perikanan;
7. Mengkonsultasikan dan memberikan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan yang bersifat urgen kepada atasan;
9. Melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
10. Melaksanakan pembinaan mutu dan penganekaragaman produk perikanan;
11. Melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
12. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan kebijakan pengawasan residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan dan lingkungan tempat ikan hidup;
13. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
14. Menyiapkan rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten;

15. Menyusun laporan statistik PDSP dan laporan tahunan penguatan daya saing produk perikanan;
16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan penguatan daya saing produk perikanan;
17. Melaksanakan kegiatan kerja sama pengembangan pasar dan promosi produk perikanan;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
19. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
20. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri atas :

- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
- b. Seksi Akses dan Promosi Produk Perikanan

## **2.2. Sumber Daya OPD**

Berdasarkan data kepegawaian pada tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma mempunyai personil sebanyak 26 orang yang berstatus PNS, dengan perincian sebagai berikut :

### **a. Berdasarkan Golongan**

- |                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| 1. Golongan IV  | : | 5 orang  |
| 2. Golongan III | : | 22 orang |
| 3. Golongan II  | : | 1 orang  |

### **b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**

- |                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| 1. Strata-2 (S2)    | : | 2 orang  |
| 2. Strata-1 (S1)/D4 | : | 23 orang |
| 3. DIPLOMA          | : | 2 orang  |

Selain personil yang berstatus PNS, dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibantu oleh tenaga THLS sebanyak 17 orang THLS dinas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Seluma baik di kantor dinas maupun di kantor BBI dalam mendukung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Tanah : 34.000 m<sup>2</sup>

2. Kendaraan Dinas :

|                   |   |    |      |
|-------------------|---|----|------|
| -Kendaraan roda 4 | : | 5  | unit |
| -Kendaraan roda 3 | : | 1  | unit |
| -Kendaraan roda 2 | : | 22 | unit |

3. Peralatan Ruang Kantor :

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| -Komputer/PC     | : | 5 buah   |
| -Laptop/Notebook | : | 12 buah  |
| -Brankas         | : | 4 buah   |
| -Lemari kayu     | : | 11 buah  |
| -Lemari besi     | : | 10 buah  |
| -Filling kabinet | : | 9 buah   |
| -Meja kantor     | : | 40 buah  |
| -Meja rapat      | : | 1 buah   |
| -Kursi lipat     | : | 200 buah |
| -Kursi tamu      | : | 3 buah   |

4. Peralatan Komunikasi dan Studio :

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| -LCD Proyektor     | : | 1 buah |
| -Telepon/Faksimili | : | 1 buah |
| -Kamera DSLR       | : | 2 buah |
| -Kamera pocket     | : | 2 buah |

Prasarana bangunan gedung yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- Gedung Kantor Dinas Perikanan
- Gedung Kantor Balai Benih Ikan (BBI)
- Gedung Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan
- Gedung TPI 7 Unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan relatif terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai dengan baik. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertical atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma pencapaian target kinerja selama periode 2016 – 2021 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Renstra Tahun Ke- |            |            |            |            | Realisasi Capaian Tahun ke |            |            |            |            | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                            |             |            |                             | 1                        | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                          | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                        | (3)         | (4)        | (5)                         | (6)                      | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                       | (12)       | (13)       | (14)       | (15)       | (16)                        | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/ Tahun)             |             |            |                             | 1.340                    | 1.370      | 1.385      | 1.760      | 1.810      | 1.240                      | 1.210      | 1.320      | 1.650      | 1.794      | 92,5                        | 88,3 | 95,3 | 93,7 | 99,1 |
| 2   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/ Tahun)            |             |            |                             | 3.664                    | 3.690      | 3.735      | 4.120      | 4.520      | 3.500                      | 3.550      | 3.650      | 3.870      | 3.915,6    | 95,5                        | 96,2 | 97,7 | 93,9 | 86,6 |
| 3   | Jumlah Rata rata Pendapatan Nelayan                        |             |            |                             | 14.600.000               | 16.050.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 22.500.000 | 14.500.000                 | 15.900.000 | 20.500.000 | 21.700.000 | 22.300.000 | 99,3                        | 99   | 97,6 | 98,6 | 99,1 |
| 4   | Jumlah Rata rata Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/ Tahun)   |             |            |                             | 26.500.000               | 27.000.000 | 27.554.000 | 27.700.000 | 27.875.000 | 26.000.000                 | 26.500.000 | 27.000.000 | 27.500.000 | 27.750.000 | 98,1                        | 98,1 | 97,9 | 99,2 | 99,5 |
| 5   | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton/ Tahun)        |             |            |                             | 340                      | 375        | 380        | 430        | 450        | 320                        | 355        | 370        | 410        | 422        | 94,1                        | 94,6 | 97,3 | 95,3 | 93,7 |
| 6   | Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan                           |             |            |                             | 19,03                    | 20,75      | 21,20      | 24,59      | 36,45      | 18,00                      | 19,50      | 20,00      | 22,50      | 32,75      | 94,5                        | 93,9 | 94,3 | 91,5 | 89,8 |
| 7   | Meningkatnya AKIP OPD                                      |             |            |                             | 66,00                    | 68,72      | 70,00      | 72,00      | 74,15      | 65,00                      | 67,00      | 68,00      | 70,00      | 73,10      | 98,4                        | 97,4 | 97,1 | 97,2 | 98,5 |

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

| Uraian                                            | Anggaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             | Realisasi Anggaran Pada |             |             |               |             | Rasio antara Realisasi dan |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|------|------|------|------|
|                                                   |                         |             |             |             |             | Tahun ke                |             |             |               |             | Anggaran Tahun ke          |      |      |      |      |
|                                                   | 2017                    | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2017                    | 2018        | 2019        | 2020          | 2021        | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)                                               | (2)                     | (3)         | (4)         | (5)         | (6)         | (7)                     | (8)         | (9)         | (10)          | (11)        | (12)                       | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap            | 300.000.000             | 380.000.000 | 425.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | 245.970.000             | 295.800.650 | 324.750.000 | 348.500.000   | 849.051.900 | 82%                        | 78%  | 76%  | 77%  | 170% |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya            | 450.000.000             | 550.000.000 | 700.000.000 | 900.000.000 | 650.000.000 | 289.000.000             | 472.000.000 | 671.550.000 | 1.428.730.000 | 334.195.600 | 64%                        | 86%  | 96%  | 159% | 51%  |
| Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanann | 200.000.000             | 275.000.000 | 325.000.000 | 385.000.000 | 400.000.000 | 180.000.000             | 235.000.000 | 268.900.000 | 305.000.000   | 62.498.800  | 90%                        | 85%  | 83%  | 79%  | 16%  |

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perikanan dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perikanan dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Seluma memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

### **2.4.1. Tantangan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tantangan dalam memberikan pelayanan di Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan dan pemasaran hasil produk olahan ikan;
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan;
3. Belum adanya kawasan pendaratan ikan dengan infrastruktur yang memadai dalam mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan.
4. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan ikan;
5. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ikan;
6. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, baik keterampilan, kelembagaan, maupun teknologi.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konservasi lingkungan.

#### **2.4.2. Peluang**

Sedangkan beberapa factor pendukung yang menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat masyarakat dalam usaha budidaya perikanan;
2. Potensi Perikanan di perairan danau ranau dan Balai Benih Ikan;
3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan.
4. Besarnya jumlah masyarakat pelaku usaha perikanan yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan
5. Tingginya minat investasi oleh swasta dalam pengembangan sektor budidaya perikanan

## **BAB. III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kabupaten Seluma merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

1. Masih belum optimalnya pembudidayaan perikanan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan
2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan
3. Pengelolaan TPI yang belum optimal
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan;
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan dan kelautan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan;
6. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan

Dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, permasalahan pokok harus diuraikan kedalam permasalahan dan akar masalah sehingga diperoleh cara terbaik untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu, dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan pokok tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

| <b>NO</b> | <b>Masalah Pokok</b>                                               | <b>Masalah</b>                                                                                     | <b>Akar Masalah</b>                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Masih Rendahnya Produksi Perikanan Tangkap                         | Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang masih minim                                             | Kurangnya sumber pendanaan bagi KUB untuk memenuhi prasarana perikanan tangkap                                   |
| 2         | Masih Rendahnya Produksi Perikanan Budidaya                        | Keterampilan POKDAKAN Masih di bawah Standar, Harga Pakan Pabrikan tinggi, Harga bibit ikan tinggi | Kurangnya keterampilan, nilai jual hasil budidaya masih rendah, bibit masih didatangkan dari luar kabupaten      |
| 3         | Masih Rendahnya Produksi Benih Ikan                                | Kurang keterampilan terhadap UPR, Sarana dan Prasarana UPR yang belum memadai                      | Kurangnya keterampilan UPR, Kurangnya sumber pendanaan untuk memenuhi prasarana UPR                              |
| 4         | Masih Rendahnya Produksi Olahan Hasil Perikanan                    | Sarana dan Prasarana untuk Pengolahan masih kurang memadai                                         | Kurangnya sumber pendanaan untuk memenuhi prasarana Pengolahan                                                   |
| 5         | Masih Rendahnya Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita                    | Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan                                                              | Kurangnya pembinaan tentang pentingnya nilai gizi ikan                                                           |
| 6         | Masih Terjadinya Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Penangkapan Ikan | Kurangnya pemahaman terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan                        | Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat akan kesadaran terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan |

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang ingin diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

#### **"SELUMA ALAP"**

Visi ini bermakna : masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai. Sejahtera merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan dimana meningkatkan perekonomian secara kreatif dan inovatif bagi usaha kecil menengah, koperasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2021 – 2026, serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, maka misi yang terkait adalah misi kedua yaitu “Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif” dengan tujuan meningkatkan produksi dan daya saing potensi unggulan daerah dan sasaran meningkatnya aktifitas agribisnis produk unggulan daerah. Strategi yang diterapkan adalah program pembangunan difokuskan pada produk unggulan strategis daerah dengan arah kebijakan pengembangan produk unggulan diarahkan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Seluma sebagai mana visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma memiliki tugas/pekerjaan sebagai berikut :

- Dalam rangka peningkatan infrastruktur yang berkualitas melalui dana APBD, APBN/DAK Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan pembangunan/pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) serta pengembangan kegiatan budidaya perikanan, perikanan tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan baik untuk perairan laut maupun perairan umum;
- Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan pada masyarakat nelayan dan pembudidaya perikanan serta meningkatkan daya saing produk dan optimalisasi hasil usaha kelautan dan perikanan meningkatkan pengawasan dan perlindungan wilayah pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Dalam mendukung misi penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dinas Perikanan melakukan pelayanan yang optimal serta melakukan penganggaran/pembelanjaan yang efektif dan efisien.
- Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik untuk aparatur maupun masyarakat nelayan dan pembudidaya;

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Telaahan Renstra K/L**

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L                                                      | Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Seluma                                                                                                                                                     | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                | Pendorong                                                                                                                                                                       |
| 1.  | Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penurunan kualitas lingkungan budidaya;</li> <li>✓ Kurang tersedianya benih ikan unggul</li> <li>✓ Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul</li> <li>✓ Penerapan CBIB yang belum optimal;</li> <li>✓ Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberian bantuan benih unggul</li> <li>✓ Sosialisasi CBIB bagi pembudidaya ikan</li> <li>✓ Pemberian alat penangkapan ikan</li> </ul> |
| 2.  | Meningkatnya pendapatan                                                                  | Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun tangkap                                                                                                                                     | Belum adanya pemberian bantuan maupun subsidi guna menekan biaya operasional                                                                                                                                                              | Menggalakan program penggunaan pakan ikan mandiri bagi pembudidaya                                                                                                              |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan     | Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat                                                                                                                                                    | Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan                                                                                       | ikan<br>✓ Gerakan Gemar Ikan<br>✓ Lomba Cipta menu Kreasi Ikan<br>✓ Pembentukan Forum Forikan |
| 4. | Meningkatnya mutu keamanan produk perikanan sesuai standar | ✓ Relatif rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan<br>✓ Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan | ✓ Masih Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai Cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar<br>Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum sertifikasi | Fasilitasi terhadap pengolahan Ikan untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi                |

Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2022 – 2026, pembangunan sektor perikanan akan tetap memegang peran yang strategis. Rencana Program Dinas Terkait Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 – 2026, yaitu sesuai dengan Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang besar-besarnya bagi kesejahteraan.

Mengacu pada misi tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran. Adapun ke-3 sasaran strategis (SS) pada Renstra DKP Provinsi Bengkulu, terdapat 1 (satu) sasaran yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, yaitu : SS-1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi, dengan 2 (dua) indikator, yaitu (1) Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%), yakni sebesar 5.6 % pada tahun 2022 menjadi 8.6 % pada tahun 2026; dan (2) Produksi Perikanan (ton), yaitu sebesar 120.450 ton pada tahun 2022 menjadi 145.500 ton pada tahun 2026.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sektor Perikanan Kabupaten Seluma memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum sertapenangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 14 kecamatan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Seluma adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Berdasarkan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan.

2. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud terdapat disepanjang pesisir tiap kecamatan dikabupaten seluma, meliputi : kecamatan sukaraja, air periukan, seluma barat, seluma selatan, ilir talo, talo kecil dan kecamatan semidang alas maras.
3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya meliputi: perikanan budidaya laut, budidaya tambak, budidaya air tawar.
4. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Seluma meliputi: kawasan budidaya perairan tersebar di 14 kecamatan, kawasan perikanan budidaya kolam air tenang tersebar di 14 kecamatan, pengembangan prasarana perikanan budidaya meliputi: BBI dan UPR meliputi kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Berikut merupakan telaahan permasalahan pelayanan PD berdasarkan Rencana tata ruang wilayah.

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD                                | Sebagai Faktor                                                           |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                            | Penghambat                                                               | Pendorong                                                        |
| 1  | Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan                  | Belum optimalnya Pengembangan Prasarana budidaya perikanan | Belum Tersedia Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Perikanan Budidaya | Tersedianya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Seluma |

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS. Fenomena perubahan iklim yang sedang terjadi diseluruh belahan dunia ini berpotensi sangat besar mengancam kelangsungan hidup seluruh mahluk hidup, utamanya yang berada di daerah pesisir. Dampak yang sedang dirasakan dalam wilayah kabupaten Seluma adalah abrasi garis pantai. Demikian halnya dengan peningkatan curah hujan serta pergeseran waktu musim penghujan - kemarau yang menimbulkan bencana banjir selama beberapa tahun terakhir.

Aktifitas pembalakan hutan di dataran tinggi selalu berdampak banjir pada saat musim penghujan tiba. Aliran air banjir yang membawa material tanah, pasir dan lumpur serta batang-batang pohon menyapu semua yang dilaluinya. Kegiatan usaha pertanian dan perikanan di wilayah dataran rendah dan pesisir menjadi terancam. Kerugian baik nyawa maupun materil relatif besar, baik yang ditanggung oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Aktifitas perusakan mangrove dan penangkapan ikan menggunakan setrum ikan dan racun ikan telah merusak sebagian besar ekosistem penting wilayah pesisir. Kerugian pembudidaya ikan dan rumput laut akibat rusaknya pematang dan pintu-pintu air menjadi rutinitas tahunan. Sementara masyarakat nelayan sering mengeluhkan semakin jauhnya tempat menangkap ikan (fishing ground). Sangat disayangkan bahwa aktifitas perusakan hutan di dataran tinggi dan perusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove sampai saat ini masih terjadi dan belum dapat dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karenanya aspek lingkungan hidup menjadi sangat penting dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 3.4.**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD**  
**berdasarkan Analisis KLHS beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

| No. | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD                                                                                                                                                                  | Permasalahan Pelayanan SKPD                              | Sebagai Faktor                                                            |                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                          | Penghambat                                                                | Pendorong                                                                                                    |
| 1   | Kerusakan ekosistem wilayah pesisir sangat tinggi, sehingga kelangsungan hidup masyarakat sangat rentan terhadap fenomena perubahan iklim, utamanya dampak meningkatnya permukaan air laut dan temperatur | Masih minimnya ketersediaan operasional dan sarana kerja | Masih terdapat aktifitas masyarakat yang mengakibatkan rusaknya ekosistem | Adanya perhatian dan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pelestarian sumber daya wilayah pesisir |

### 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan; Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas disebabkan oleh masih kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM Aparatur yang ada dan masih kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan relatif masih kurang, sehingga perlu untuk memprioritaskan kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis pengelolaan usaha perikanan berbasis kelompok sebagai wadah pengembangan usaha.
3. Data dan informasi potensi dan hasil pembangunan belum tersusun secara sistematis, akurat dan Lengkap sehingga menimbulkan kendala dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan secara komprehensif.

4. Prasarana Pendaratan Ikan belum dapat beroperasi disebabkan oleh belum tersedianya beberapa fasilitas fungsional untuk melayani aktifitas nelayan melaut dan mendaratkan ikan serta belum dibentuknya tim pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan / Tempat Pendaratan Ikan.
5. Rendahnya produktivitas usaha nelayan disebabkan oleh terkonsentrasinya lokasi penangkapan ikan di wilayah pesisir Kabupaten Seluma, banyaknya alat tangkap jenis bagan apung dan sero disepanjang pantai, serta penggunaan perahu motor tempel dan kapal berukuran kecil (dibawah 5 GT) yang mendominasi 80% kapal perikanan.
6. Pemanfaatan lahan budidaya perikanan belum optimal disebabkan oleh masih terkendala kondisi fisik lahan tambak/kolam, ketersediaan prasarana dan sarana saluran irigasi tambak, jalan tani dan jembatan, serta belum diterapkannya cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), sehingga produktivitas usaha relatif masih rendah.
7. Kualitas produk perikanan baik segar maupun olahan relatif masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam penanganan produk perikanan sehingga mutu produk (syarat teknis, sanitasi dan higienis) dapat terjaga dengan baik. Untuk mengoptimalkan nilai produk perikanan perlu dilakukan menerapkan sistem rantai dingin dan diversifikasi produk olahan untuk menghasilkan nilai tambah dan peningkatan pendapatan.
8. Pengamanan Sumber Daya kelautan dan perikanan belum dapat dilaksanakan secara optimal, olehnya itu perlu untuk menyediakan prasarana dan sarana pengawasan yang memadai, meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta melibatkan peran aktif masyarakat pesisir melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
9. Dalam rangka upaya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, utamanya dampak meningkatnya permukaan air laut dan temperatur, perlu segera

melestarikan sumber daya wilayah pesisir dan laut melalui upaya merehabilitasi kerusakan ekosistem wilayah pesisir melalui pembentukan daerah perlindungan laut dan daerah perlindungan mangrove.

## **BAB. IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Seluma berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Seluma, Dinas Perikanan merujuk pada visi Kabupaten Seluma yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seluma yaitu "**Mila Bersamo Untuk Seluma ALAP**". Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) adalah Misi ke 2 (satu) yaitu "**Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif**".

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2022–2026, maka disusun tujuan pembangunan perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1****Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO  | TUJUAN                                                                            | IDIKATOR TUJUAN                                           | SASARAN                         | IDIKATOR SASARAN                                   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |             |              |             |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|     |                                                                                   |                                                           |                                 |                                                    | Tahun ke I                                   | Tahun ke II | Tahun ke III | Tahun ke IV | Tahun ke V |
| (1) | (2)                                                                               | (4)                                                       | (3)                             | (4)                                                | (5)                                          | (6)         | (7)          | (8)         | (9)        |
| 1   | Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah | Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB | Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)             | 2.219                                        | 2.330       | 2.446        | 2.568       | 2.697      |
|     |                                                                                   |                                                           |                                 | Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)            | 4.091                                        | 4.173       | 4.257        | 4.342       | 4.342      |
|     |                                                                                   |                                                           |                                 | Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan (Ton/Tahun) | 32.16                                        | 35.37       | 38.91        | 42.80       | 47.08      |
| 2   | Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD                                              | Nilai evaluasi SAKIP OPD                                  | Meningkatnya AKIP OPD           | Nilai evaluasi SAKIP OPD                           | B                                            | B           | BB           | BB          | A          |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah seperti pada Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| No | <p>Visi : <b>Terwujudnya SELUMA ALAP (Aksesabilitas, Lapangan Kerja, Adat Istiadat, dan Perekonomian)</b></p> <p>Misi : <b>"Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif"</b></p> |                       |                                                                                                                |                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran               | Strategi                                                                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                               |
| 1  | Meningkatnya tata kelola Kinerja OPD                                                                                                                                                                                                        | Meningkatnya AKIP OPD | Pengembangan kapasitas SDM Aparatur melalui perekrutan, Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional | Memberikan kesempatan kepada SDM aparatur untuk mengembangkan keahlian dan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Penyediaan sarana dan prasarana kerja                                                                          | Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Penyediaan dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja Dinas                                                  | Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja                                                                      |

| No | Tujuan                                                                            | Sasaran                         | Strategi                                                                                                       | Arah Kebijakan                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah | Meningkatnya Produksi Perikanan | Penyediaan sarana produksi usaha budidaya perikanan                                                            | Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pembudidayaan perikanan                           |
|    |                                                                                   |                                 | Peningkatan kapasitas usaha penangkapan ikan dan ketersediaan sumber daya ikan serta mutu hasil tangkapan ikan | Pengembangan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan |
|    |                                                                                   |                                 | Peningkatan kualitas dan kuantitas sapras produksi perikanan                                                   | Meningkatan kualitas dan kuantitas sapras produksi perikanan                             |
|    |                                                                                   |                                 | Pemberdayaan kelompok usaha bersama, POKDAKAN, POKLASAR                                                        | Menyediakan sarana usaha dan pembinaan pengelolaan kelompokusaha masyarakat              |

## **BAB. VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
  - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
  - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
  - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- b. Pengelolaan Pembudidaya Ikan
  - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
  - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Lahan untuk pembudidayaan ikan di Darat
  - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penertiban Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan tanda daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- d. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota
  - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airnya yang dapat diusahakan dalam satu (1) Kabupaten/Kota
- Penetapan Persyaratan dan Prosedur penertiban tanda daftar kapal perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
  - Pelayanan Penertiban tanda daftar kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- a. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
  - Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk lebih jelasnya, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah disajikan pada Tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif**  
**Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026**

| Tujuan                               | Sasaran               | Kode       | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (out come) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |          |               |          |               |          |               |          |               |                                                             |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi          |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                                      |                       |            |                                                                       |                                                                            |                                          | Tahun-1                                       |               | Tahun-2  |               | Tahun-3  |               | Tahun-4  |               | Tahun-5  |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                              |                 |
|                                      |                       |            |                                                                       |                                                                            |                                          | Target                                        | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target                                                      | Rp            |                                              |                 |
| (1)                                  | (2)                   | (3)        | (4)                                                                   | (5)                                                                        | (6)                                      | (7)                                           | (8)           | (9)      | (10)          | (11)     | (12)          | (13)     | (14)          | (15)     | (16)          | (17)                                                        | (18)          | (19)                                         | (20)            |
| Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD | Meningkatnya AKIP OPD | 25.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA          | Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor                           | 100%                                     | 100%                                          | 2.910.000.000 | 100%     | 3.217.000.000 | 100%     | 3.330.000.000 | 100%     | 3.673.000.000 | 100%     | 4.010.000.000 | 100%                                                        | 3.950.000.000 | Sekretariat Sub Bagian Perencanaan           | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah      | Jmlah Dokumen perencanaan yang disusun                                     | 5 Dok                                    | 5 Dok                                         | 25,000,000    | 5 Dok    | 35,000,000    | 5 Dok    | 45,000,000    | 5 Dok    | 55,000,000    | 5 Dok    | 60.000.000    | 5 Dok                                                       | 25,000,000    | Sekretariat Sub Bagian Perencanaan           | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 12 Bln                                   | 12 Bln                                        | 2.470.000.000 | 12 Bln   | 2.500.000.000 | 12 Bln   | 2.550.000.000 | 12 Bln   | 2.600.000.000 | 12 Bln   | 2.680.000.000 | 12 Bln                                                      | 2.680.000.000 | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                | Jumlah Pengurus Barang OPD                                                 | Jumlah pengurus barang                   | 24 OB                                         | 20.000.000    | 24 OB    | 22.000.000    | 24 OB    | 25.000.000    | 24 OB    | 28.000.000    | 24 OB    | 30.000.000    | 24 OB                                                       | 30.000.000    | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat, Bimtek                               | 3 OK                                     | 5 OK                                          | 35.000.000    | 5 OK     | 45.000.000    | 6 OK     | 55.000.000    | 6 OK     | 60.000.000    | 7 OK     | 65.000.000    | 7 OK                                                        | 65.000.000    | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase keterpenuhan administrasi umum perangkat daerah                 | 100%                                     | 100%                                          | 150.000.000   | 100%     | 250.000.000   | 100%     | 350.000.000   | 100%     | 450.000.000   | 100%     | 550.000.000   | 100%                                                        | 550.000.000   | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah barang yang diadakan                                                | 5 Unit                                   |                                               |               | 8 Unit   | 95.000.000    |          |               | 12 Unit  | 135.000.000   | 15 Unit  | 175.000.000   | 15 Unit                                                     | 175.000.000   | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya jasa pelayanan kantor                                          | 1 Th                                     | 12 Bulan                                      | 150.000.000   | 12 Bulan | 180.000.000   | 12 Bulan | 200.000.000   | 12 Bulan | 230.000.000   | 12 Bulan | 250.000.000   | 12 Bulan                                                    | 250.000.000   | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |
|                                      |                       | 25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Tersedianya dana untuk pemeliharaan barang dan aset OPD                    | 1 Th                                     | 12 Bulan                                      | 85.000.000    | 12 Bulan | 125.000.000   | 12 Bulan | 150.000.000   | 12 Bulan | 170.000.000   | 12 Bulan | 200.000.000   | 12 Bulan                                                    | 200.000.000   | Sekretariat                                  | Dinas Perikanan |

| Tujuan                                                                                                                               | Sasaran                         | Kode       | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      |                                 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                          | Tahun-1                                       |            | Tahun-2       |            | Tahun-3       |            | Tahun-4       |            | Tahun-5       |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |                 |
|                                                                                                                                      |                                 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                          | Target                                        | Rp         | Target        | Rp         | Target        | Rp         | Target        | Rp         | Target        | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |                 |
| (1)                                                                                                                                  | (2)                             | (3)        | (4)                                                                                                                                                                                  | (5)                                                                       | (6)                                      | (7)                                           | (8)        | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       | (17)                                                        | (18)       | (19)                                         | (20)            |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya Dengan memanfaatkan potensi sumberdaya secara lestari dan berkenalan jutaan | Meningkatkan Produksi Perikanan | 25,03      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)                             | 1.880                                    | 2.219                                         | 82.263.900 | 2.330         | 82.263.900 | 2.446         | 82.263.900 | 2.568         | 82.263.900 | 2.697         | 82.263.900 | 2.697                                                       | 82.263.900 | Bidang Perikanan Tangkap                     | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                      |                                 | 25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                             | Tersedianya informasi pengelolaan penangkapan ikan                        | 1 Dok                                    | 1Dok                                          | 25.000.000 | 1 Dok         | 40.000.000 | 1 Dok         | 45.000.000 | 1 Dok         | 45.000.000 | 1 Dok         | 45.000.000 | 1 Dok                                                       | 45.000.000 | Bidang Perikanan Tangkap                     | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                      |                                 | 25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                              | Jumlah KUB yang difasilitasi                                              | 10 KUB                                   | 15 KUB                                        | 20.000.000 | 20 KUB        | 30.000.000 | 20 KUB        | 40.000.000 | 25 KUB        | 45.000.000 | 25 KUB        | 50.000.000 | 25 KUB                                                      | 50.000.000 | Bidang Perikanan Tangkap                     | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                      |                                 | 25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                         | Jumlah TPI yang beroperasi                                                | 8 TPI                                    | 8 TPI                                         | 25.000.000 | 8 TPI         | 35.000.000 | 8 TPI         | 40.000.000 | 8 TPI         | 45.000.000 | 8 TPI         | 55.000.000 | 8 TPI                                                       | 55.000.000 | Bidang Perikanan Tangkap                     | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                      |                                 | 25.03.2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airnya yang dapat diusahakan dalam Satu (1) Kabupaten/ Kota | Jumlah rekomendasi usaha penangkapan ikan yang diterbitkan                | 3 rekomendasi                            | 3 rekomendasi                                 | 30.000.000 | 3 rekomendasi | 30.000.000 | 3 rekomendasi | 30.000.000 | 3 rekomendasi | 30.000.000 | 3 rekomendasi | 30.000.000 | 3 rekomendasi                                               | 30.000.000 | Bidang Perikanan Tangkap                     | Dinas Perikanan |

| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                                                                                               | Kode                         | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |              |             |              |             |              |             |              |             |                                                             |                 |                                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |                                                                                                                                              |                                                                           |                                          | Tahun-1                                       |             | Tahun-2      |             | Tahun-3      |             | Tahun-4      |             | Tahun-5      |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |                                                                                                                                              |                                                                           |                                          | Target                                        | Rp          | Target       | Rp          | Target       | Rp          | Target       | Rp          | Target       | Rp          | Target                                                      | Rp              |                                              |                 |
| (1)                                                                                                                                   | (2)                                                                                                   | (3)                          | (4)                                                                                                                                          | (5)                                                                       | (6)                                      | (7)                                           | (8)         | (9)          | (10)        | (11)         | (12)        | (13)         | (14)        | (15)         | (16)        | (17)                                                        | (18)            | (19)                                         | (20)            |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya Dengan memanfaatkan potensi sumberdaya secara lestari dan berkeadilan jutaan | Meningkatnya Produksi Perikanan                                                                       | 25,04                        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                       | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)                            | 4.091                                    | 4.091                                         | 334.235.600 | 4.173        | 334.235.600 | 4.257        | 334.195.600 | 4.342        | 334.195.600 | 4.342        | 334.195.600 | 4.342                                                       | 1.671.058.000   | Perikanan Budidaya                           | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 25.04.2.02                   | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                          | Jumlah Pokdakan yang didampingi                                           | 10 Pokdakan                              | 12 Pokdakan                                   | 25.000.000  | 15 Pokdakan  | 35.000.000  | 17 Pokdakan  | 40.000.000  | 18 Pokdakan  | 42.000.000  | 20 Pokdakan  | 47.000.000  | 20 Pokdakan                                                 | 47.000.000      | Perikanan Budidaya                           | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 3.25.04.2.04                 | Pengelolaan Pembudidaya Ikan                                                                                                                 | Jumlah Pokdakan yang dimonitoring                                         | 10 Pokdakan                              | 12 Pokdakan                                   | 40.000.000  | 15 Pokdakan  | 50.000.000  | 17 Pokdakan  | 60.000.000  | 18 Pokdakan  | 60.000.000  | 20 Pokdakan  | 65.000.000  | 20 Pokdakan                                                 | 65.000.000      | Perikanan Budidaya                           | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 25,05                        | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                        | Persentase pengawasan Sumber Daya Perikanan yang diawasi                  | 70%                                      | 75%                                           | 25.000.000  | 75%          | 35.000.000  | 77%          | 35.000.000  | 78%          | 40.000.000  | 80%          | 50.000.000  | 80%                                                         | 50.000.000      | 80%                                          | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 25.05.2.01                   | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ Kota | Jumlah pengawasan Sumber Daya Perikanan yang diawasi                      | 10 Pokmaswas                             | 10 Pokmaswas                                  | 25.000.000  | 10 Pokmaswas | 35.000.000  | 15 Pokmaswas | 35.000.000  | 15 Pokmaswas | 40.000.000  | 20 Pokmaswas | 50.000.000  | 20 Pokmaswas                                                | 50.000.000      | PDSPP                                        | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 25,06                        | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                             | Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan              | 65%                                      | 25 Poklahsar                                  | 47.000.000  | 67%          | 55.000.000  | 68%          | 65.000.000  | 70%          | 75.000.000  | 72%          | 85.000.000  | 72%                                                         | 85.000.000      | PDSPP                                        | Dinas Perikanan |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       | 25.06.2.01                   | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                    | Jumlah rekomendasi usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang diterbitkan   | 8 TDU                                    | 8 TDU                                         | 25.000.000  | 10 TDU       | 30.000.000  | 12 TDU       | 35.000.000  | 12 TDU       | 40.000.000  | 15 TDU       | 45.000.000  | 15 TDU                                                      | 45.000.000      | PDSPP                                        | Dinas Perikanan |
| 25.06.2.02                                                                                                                            | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Poklashar yang dibina | 8 Poklahsar                                                                                                                                  | 8 Poklahsar                                                               | 22.000.000                               | 10 Poklahsar                                  | 25.000.000  | 10 Poklahsar | 30.000.000  | 12 Poklahsar | 35.000.000  | 15 Poklahsar | 40.000.000  | 15 Poklahsar | 40.000.000  | PDSPP                                                       | Dinas Perikanan |                                              |                 |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, maka ditetapkan indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sebagaimana tabel dibawah ini (Tabel 7.1 - Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD).

**Tabel 7.1**

#### **Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator                                          | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
|    |                                                    |                            | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                             |
| 1  | Nilai Evaluasi SAKIP OPD                           | B                          | B      | B     | BB    | BB    | A     | A                           |
| 2  | Produksi PerikananTangkap (ton/tahun)              | 1.880                      | 2.219  | 2.330 | 2446  | 2.568 | 2697  | 2697                        |
| 3  | Produksi Perikanaan Budidaya (ton/Tahun)           | 3.765                      | 4091   | 4173  | 4257  | 4342  | 4342  | 4342                        |
| 4  | Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan (Ton/Tahun) | 27.15                      | 32.16  | 35.37 | 38.91 | 42.80 | 47.08 | 47.08                       |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 ini sebagai self-evaluation dan upaya yang terus menerus dari Dinas Perikanan untuk mewujudkan komitmennya dalam melaksanakan akuntabilitas publik dan mengembangkan, serta menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak dengan harapan dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Seluma. Oleh sebab itu diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan segenap aparatur Dinas Perikanan serta masyarakat Kabupaten Seluma.